



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK KUJANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KIKI LUKMANUL HAKIM**
2. Jabatan : **GENERAL MANAGER**
3. NHK : **275763**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.180.800.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/98 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.510.000.000
2. Tanah Seluas 246 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.120.000.000
3. Tanah Seluas 1348 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, WARISAN Rp. 269.600.000
4. Tanah Seluas 794 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, WARISAN Rp. 158.800.000
5. Tanah Seluas 612 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, WARISAN Rp. 122.400.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 462.500.000

1. MOBIL, HONDA SUV/CRV Tahun 2011, WARISAN Rp. 110.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOBIL, ISUZU SUV/MUX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 870.012.863**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 128.426.778**F. HARTA LAINNYA** Rp. 1.085.683.770

Sub Total Rp. 6.727.423.411



III. HUTANG

Rp. 923.104.230

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.804.319.181

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.